



**PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XXIV  
TAHUN 2026**

**PENGUMUMAN**

**PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XXIV TAHUN 2026  
NOMOR: 04/Pansel/Ad Hoc TPK/VIII/2026**

- I. Panitia Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2026 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Republik Indonesia;
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah;
  4. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang Hukum (antara lain : Hukum Keuangan dan Perbankan, Hukum Administrasi, Hukum Pertanahan, Hukum Pasar Modal dan Hukum Pajak) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
  5. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
  6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  7. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia;
  9. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
  10. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
  11. Melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ;
  12. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi;
  13. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi;
  14. Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Aparatur Sipil Negara;
  15. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.
- II. Pendaftaran dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada **Ketua Mahkamah Agung RI, dengan alamat Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat dan ditandatangani oleh Pelamar;**
  - b. Fotokopi Ijazah Pendidikan Tinggi yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang;
  - c. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - d. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - e. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat;
  - f. Surat Kelakuan Baik/SKCK dari Kepolisian yang masih berlaku;
  - g. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota salah satu Partai Politik di atas kertas bermeterai Rp.10.000,00;
  - h. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc* di atas kertas bermeterai Rp.10.000,00;
  - i. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermeterai Rp.10.000,00;
  - j. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi Pelamar yang berstatus Aparatur Sipil Negara;
  - k. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermeterai Rp. 10.000,00;
  - l. Pas foto terbaru ukuran 4x6 berwarna dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar;
  - m. Fotokopi KTP;
  - n. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
  - o. Daftar Riwayat Hidup lengkap dan riwayat pekerjaan lengkap dan ditulis secara terinci selama 15 (lima belas) tahun dibidang hukum yang ditandatangani oleh Pelamar;
  - p. Bukti telah melaporkan harta kekayaan (LHKPN) dapat diserahkan setelah lulus ujian tertulis / pada saat ujian lisan.
- III. Ketentuan Pendaftaran:
1. Seluruh pendaftar wajib melengkapi semua persyaratan yang baru seperti tersebut di atas (huruf a s/d p).
  2. Pendaftaran dilakukan secara online melalui <http://adhoc.mahkamahagung.go.id> mulai tanggal 6 Agustus 2026 s/d 4 September 2026.
  3. Pendaftar yang telah melakukan pendaftaran online diwajibkan untuk mengirimkan seluruh persyaratan administrasi yang dimasukkan dalam amplop tertutup warna coklat polos dan diserahkan kepada Panitia Daerah di Pengadilan Tinggi sesuai pendaftaran dengan mencantumkan Kode Jabatan Tingkat Pertama atau Tingkat Banding dan Nomor Telepon/HP pada sudut kanan atas Surat Permohonan maupun pada Amplop Surat. Berkas sudah diterima Panitia Daerah paling lambat tanggal 4 September 2026.
  4. Pengumuman kelulusan administrasi, ujian tertulis dan tahap seleksi selanjutnya dapat dilihat pada website Mahkamah Agung [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) dan Media Sosial Mahkamah Agung.
  5. Seleksi tertulis, Profile Assessment dan Wawancara, tempat dan waktu penyelenggaraan akan ditentukan kemudian.
  6. Dalam ujian seleksi tertulis diperkenankan untuk membuka buku (Open Book).

Jakarta, 6 Agustus 2026

PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XXIV TAHUN 2026  
Ketua,  
ttd.  
Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.

Sekretaris II,  
ttd.  
Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF  
SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC* PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TAHAP XXIV TAHUN 2026

NAMA PELAMAR : .....  
YANG DILAMAR :TINGKAT BANDING/TINGKAT PERTAMA  
NOMOR BERKAS : .....  
TANGGAL TERIMA BERKAS : .....

1. Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, dengan alamat Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat dan ditandatangani oleh Pelamar.
2. Fotokopi Ijazah pendidikan tinggi yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang (legalisir basah). Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang Hukum (antara lain : Hukum Keuangan dan Perbankan, Hukum Administrasi, Hukum Pertanahan, Hukum Pasar Modal dan Hukum Pajak)
3. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah.
4. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Pemerintah.
5. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat.
6. Surat Kelakuan Baik/SKCK dariKepolisian yang masih berlaku.
7. Surat pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik di atas kertas bermaterai Rp.10.000,00.
8. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc* di atas kertas bermaterai Rp.10.000,00.
9. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermaterai Rp.10.000,00.
10. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Aparatur Sipil Negara.
11. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,00.
12. Pas foto terbaru ukuran 4x6 berwarna sebanyak 4 (enam) lembar.
13. Fotokopi KTP (minimal umur 40 tahun).
14. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir.
15. Daftar Riwayat Hidup lengkap dan Riwayat Pekerjaan lengkap dan ditulis secara terinci yang ditandatangani oleh Pelamar.
16. Pengalaman bidang hukum sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.  
(tuliskan pengalaman bidang hukum pelamar)

| KETERANGAN : | TTD & NAMA PEMERIKSA BERKAS |
|--------------|-----------------------------|
|              | (.....)                     |

Catatan:  
\* Coret yang tidakperlu  
Berkas disusun berdasarkan urutan Kelengkapan Persyaratan Administratif.